

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Harisdayanti, R. Fauzi, dan R. Mulyana, “Perancangan Manajemen Risiko Operasional Pada SPBE/E- Gov Berdasarkan Permen PanRB Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 7, hlm. 7348–7353, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/162254/slug/perancangan-manajemen-risiko-operasional-pada-spbe-e-government-berdasarkan-permen-panrb-nomor-5-tahun-2020-studi-kasus-pemerintah-kabupaten-bandung.html>
- [2] S. Suwanty, R. Fauzi, dan R. Mulyana, “Perancangan Manajemen Risiko Strategis Pada Spbe/E-Gov Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020 Studi Kasus Pemerintah Kota Bandung,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 7, No. 2, no. 2, hlm. 7419–7428, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/12833>
- [3] R. Rochamwati dan M. Salman, “Design of Risk Management in SPBE Infrastructure Based on PAN-RB Ministerial Regulation Number 5 of 2020 (Case Study: XYZ Institution),” *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, vol. 16, No. 2, hlm. 41–55, 2023, doi: 10.24036/jtip.v16i2.724.
- [4] R. Bisma, “Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan,” *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, vol. Volume 06, 2022, doi: 10.26740/jieet.v6n2.p73-79.
- [5] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Indonesia, 2018, hlm. 110.
- [6] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Indonesia, 2020. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- [7] Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, “Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023,” Bandung, 2024.
- [8] R. R. Kusumah, F. Setiadi, dan K. A. Achmad, “Analisis Manajemen Risiko Menggunakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE (Studi Kasus : Diskominfo Kabupaten Kuningan),” hlm. 1–11, [Daring]. Tersedia pada: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/232579/slug/analisis-manajemen-risiko-menggunakan-kerangka-kerja-manajemen-risiko-spbe-studi-kasus-diskominfo-kabupaten-kuningan-dalam-bentuk-buku-karya-ilmiah.html>
- [9] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 2020.

- [10] Badan Standardisasi Nasional, “SNI ISO/IEC 31000:2018,” *BSI Standard Publication*, 2018.
- [11] ISACA, *COBIT 5 for Risk*. ISACA, 2013.
- [12] Bupati Kabupaten Bandung, *Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 2021.
- [13] Bupati Kabupaten Bandung, *Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*. 2023.
- [14] S. A. N. Sari, S. Prabowo, dan M. Al Makky, “Analisis Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE di Dinas Pendidikan Jawa Barat,” 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/186147/slug/analisis-risiko-teknologi-informasi-menggunakan-kerangka-kerja-manajemen-risiko-spbe-di-dinas-pendidikan-jawa-barat.html>